

Kontraktor Dilarang Transaksi Tunai

● Pembayaran Proyek Pemerintah

SEMARANG - Kontraktor pemenang tender proyek pemerintah dilarang melakukan transaksi tunai dengan pihak mana pun.

Pemerintah Provinsi Jateng akan mencantumkan pasal kewajiban transaksi tidak tunai (*non cash transactions*) tersebut dalam setiap perjanjian kontrak.

Aturan baru itu disepakati Gubernur Ganjar Pranowo dalam pertemuan dengan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poemomo di kantor gubernur, Jumat (13/9). BPK melakukan *roadshow* ke sejumlah daerah dan bertemu gubernur-gubernur untuk mengampun sebagai upaya pencegahan korupsi.

"Semua transaksi harus via perbankan untuk memudahkan pengawasan dan penelusuran aliran dana," kata Hadi Poemomo.

Menurut dia, *non cash transactions* sudah dilaksanakan dalam transaksi dari pemerintah daerah kepada pemenang tender. Namun, masih banyak kontraktor bertransaksi secara tunai dalam pengadaan barang dan jasa, demikian pula dalam pembayaran kepada subkontraktor atau penyedia barang. Dengan pembayaran tunai, maka pengeleman harga dan transaksi fiktif sangat mudah dilakukan.

Dijelaskannya, transaksi nontunai diperlukan karena menyangkut uang negara. Uang negara yang keluar harus diketahui peruntukannya, yaitu kepada siapa, untuk apa, dan berapa jumlahnya.

"Transaksi tidak tunai akan

memudahkan pengawasan, mudah ditelusuri, dapat diyakinkan, dipastikan jumlah transaksinya, dapat dicari tahu apakah item transaksi lengkap, serta sumber transaksi jelas atau tidak," urainya.

Tanpa Pergub

Sebelumnya, BPK telah mengunjungi gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur. Semua menyambut baik imbauan BPK dan langsung melaksanakan pada kontrak proyek terbaru.

"Semua langsung setuju, termasuk Pak Ganjar. Pelaksanaannya mudah, tinggal masukkan di kontrak. Kalau kontraktor tidak

setuju, maka kontrak batal dan diberikan kepada pemenang kedua," katanya.

Ganjar Pranowo menyatakan, Jawa Tengah kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dalam pengelolaan keuangan. Namun predikat yang disematkan BPK itu ternyata tidak menjamin transaksi keuangan bebas korupsi. Karena itu, langkah terobosan BPK patut diapresiasi dan transaksi via perbankan selayaknya diterapkan pada setiap proyek pemerintah.

Ia akan mengajak 35 bupati/wali kota di Jateng agar mengikuti terobosan tersebut. Namun, Ganjar belum akan membuat peraturan gubernur.

"Tidak usah pakai pergub, langsung saja saya perintah lisan. Tapi ini hanya untuk proyek baru. Proyek lama masih boleh pakai cara lama," tandasnya. (H68, J17-59)



SM/Irawan Aryanto

BERI KETERANGAN: Ketua BPK Hadi Poernomo didampingi Gubernur Ganjar Pranowo memberikan keterangan terkait *non cash transactions* dilingkungan Pemprov Jateng dalam pengadaan barang dan jasa untuk menekan KKN, Jumat (13/9). (30)